

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Bucy, Pamela, H. *White Collar Crime: Cases and Materials*. St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1992.
- De Feo, Michael A. “*Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering*”, *Den. J. Int’l L. & Pol’y*, vol. 18:3, 1990.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: N.W. Norton and Company. 1984.
- Mamudji, Sri, et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Noble, Ronald, K, et. al. *A New Anti-Crime Framework for The world: Merging The Objective and Subjective Models for Fighting Money Laundering Int’l. L. & Pol.* Vol. 30:79. 1997-1998
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Books Terrace & Library 2007.
- Pardede, Marulak. *Masalah Money Laundering di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. 1994/1995.
- Reksodiputro, Mardjono. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonomi (money laundering)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1992/1992.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ke Tiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pegabdian Hukum UI. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1996.
- Soekanto, Soerjono, et.al. *Penelitian Hukum Normatif ed.1; cet.8*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan cet.1*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002.

Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan Edisi Revisi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.

Utrecht, E, et. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cet. 11*. Jakarta: Ichtiar Baru. 1989.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU. No. 25, LN. No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Ekspor Impor Peredaran dan Penyaluran Psikotropika, UU No. 5 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Tentang Perbankan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

### **Makalah/Artikel**

Sarah N. Wellings, Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law. Yang dimuat dalam: *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22 No.3 Tahun 2003

Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor, Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat" *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22. No.3 Tahun 2003)

Yunus Husein, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, disampaikan dalam bentuk slide, (Jakarta, 4 Mei 2004)

### **Media Massa**

"PPATK", <<http://id.wikipedia.org/wiki/PPATK>>

[www.egmont.org](http://www.egmont.org) atau Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the financial of Terrorism*, Maret 2003

<http://www.moneylaundering.com/freeresource/mlaws.aspx>

Billy Steel, “money laundering-what is money money laundering”. <http://www.Laundryman.unet.com>, diakses 25 Agustus 2008

John Mc Dowell & Gary Novis, “The Consequences of Money Laundering and Financial Crime”, <http://www.usteas.gov>, diakses tanggal 25 Agustus 2008

<http://www.Indonesianembassy.fi/in/filemanager/MOUPPATK.Pdf>. Lihat profil /sejarah PPATK, <http://www.ppatk.go.id>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2008.

Yunus Husein, Soal Cuci Uang, Indonesia dianggap aman, wawancara dengan Ade Ardi M dkk dari majalah Pilars, nomor 03, THN. VIII terbit tanggal 24-30 Januari 2005

<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-sl-2007-moenthewis-3966&PHPSESSID=cafl80ece5bo4a7bb38bead18988c5d8>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2008

<http://suidiharsa.wordpress.com/2007/06/20/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-Indonesia-2/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2008

[www.ppatk.go.id/berita.php?nid=066](http://www.ppatk.go.id/berita.php?nid=066), diakses pada tanggal 11 Oktober 2008

<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0305/10/ekonomi/304747.htm>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2008

<http://www.ppatk.go.id/pdf/pedoman1.pdf>

[www.ppatk.go.id/statistik.php?nid=19](http://www.ppatk.go.id/statistik.php?nid=19), diakses pada tanggal 3 Desember 2008.

Media Indonesia, Survei Kemudahan Berbisnis di 155 negara, Peringkat Indonesia Rendah, Rabu 14 September 2005, hal 4, kolom 2-

Suhadibroto, Tindak Pidana Pencucian Uang, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Mei 2003

Muladi, *Peranan Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Newsletter, Komisi Hukum Nasional, Edisi tahun 2002.

## Wawancara

Yunus Husein. Kepala PPATK. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 20 November 2008, di kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35. Jakarta 10120.

Fithriyadi Muslim. Direktur Hukum dan Regulasi. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 November 2008, di kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda No. 35. Jakarta 10120.

### **Lain-Lain**

Rick McDonnell. Establishment of the FIU. workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta tanggal 16 Desember 2002.

Black's Law Dictionary

Webster Dictionary

Collins Cobuild Dictionary

Yunus Husein. Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering. (Makalah disampaikan pada seminar Money Laundering Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi. Jakarta 23 Agustus 2001.

Yunus Husein. *Peranan PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, Video Convergence Nasional. Diselenggarakan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia. Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga pada tanggal 16 Mei 2004 di Gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana pendapat ini juga menjadi bahan penelitian oleh Mardjono Reksodiputro tentang *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Maret-Juni 2006.

Laporan Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional. *Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Maret-Juni 2006.

Mardjono Reksodiputro. Disampaikan pada waktu diskusi penelitian "*Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*" oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional. Pada tanggal 2 Maret 2006, di Gedung Komisi Hukum Nasional lantai 3, Jalan Diponegoro Nomor 4.

Laporan Tahunan PPATK, Tahun 2007